



STRATEGI PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENDAYAGUNAAN POTENSI MODAL SOSIAL

Bambang Sulistiono¹⁾, Bambang Martin Baru²⁾

^{1,2)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Merdeka Madiun

Email: bambangsulistiono@unmer-madiun.ac.id

Abstrak

Modal sosial merupakan potensi sumber daya pembangunan, karena modal sosial menghasilkan suatu bentuk kerja sama antar warga desa yang diwujudkan melalui kegiatan gotong royong dan keswadayaan masyarakat. Keterbatasan sumber dana pembangunan desa bukan menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan desa, sejauh tumbuh dan berkembangnya gotong royong dan keswadayaan masyarakat desa. Persoalannya, Pemerintah desa belum memanfaatkan secara optimal potensi modal sosial untuk mendukung pembangunan desa. Pelibatan warga desa dalam tahapan pembangunan desa hanya sebatas untuk memenuhi ketentuan formalitas saja, akibatnya program pembangunan desa yang dihasilkan kurang menyentuh kepentingan dan kebutuhan warga desa, akibatnya masyarakat apatis, dan masa bodah terhadap program pembangunan desa

Kata Kunci: Modal Sosial, Pembangunan Desa

Abstract

Social capital is a potential development resource, because social capital produces a form of cooperation between villagers that is realized through mutual cooperation and community self-sufficiency. The limited source of funds for village development is not an obstacle in the implementation of village development, as long as the growth and development of mutual cooperation and self-sufficiency of the village community. The problem is that the village government has not optimally utilized the potential of social capital to support village development. The involvement of villagers in the stages of village development is only limited to meeting the formality provisions, consequently the resulting village development program does not touch the interests and needs of the villagers, consequently the community is apathetic, and the period of being undermined by the village development program

Keywords: Social Capital, Village Development

I. PENDAHULUAN

Pembangunan desa memiliki fungsi strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Berbagai program pembangunan desa yang distimulasikan guna mengatasi persoalan-persoalan sosial, ternyata belum mampu mengatasi permasalahannya. Salah satu faktor yang menjadi sebab ketidakberhasilan program pembangunan desa karena belum berjalan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan warga desa. Program pembangunan yang dihasilkan pemerintah desa belum menyentuh esensi dari

persoalan yang dihadapi masyarakat luas, akibatnya warga desa kurang merespon secara positif dalam implementasi program pembangunan desa. Sebenarnya dalam kehidupan masyarakat desa, tumbuh dan berkembang potensi modal sosial yang dapat didayagunakan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan desa, bahkan modal sosial sudah berlangsung turun temurun dan menjadi tradisi dalam lingkungan pedesaan.

Modal sosial sebagai sumber daya untuk membangun suatu jaringan kerja sama dalam suatu masyarakat, dengan melalui kerja



sama akan menghasilkan efektifitas dalam pencapaian harapan dan tujuannya. Modal sosial tersebut terbentuk atas dasar *trust* (kepercayaan), jaringan, dan norma sosial (Fukuyama, 1995). Terbentuknya suatu jaringan kerja sama dilandasi oleh adanya *trust* dari masing-masing individu dalam suatu komunitas. *Trust* dapat dipertahankan apabila masing-masing individu memiliki ketaatan dalam menjaga norma sosial sebagai landasan dalam menjalin kerja sama tersebut. Maka kekuatan dan kelangsungan jaringan kerja sama sangat ditentukan oleh *trust* dan norma sosial. Dalam hubungan sosial itu, biasanya dibangun atas fondasi ikatan solidaritas yang tinggi sebagai bagian dari suatu komunitas. Ikatan solidaritas ini akan menjaga kohesivitas masing-masing individu melalui upaya menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan dalam komunitas. Ikatan solidaritas itu, akan menghasilkan bentuk tanggungjawab sosial untuk lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Perasaan tidak egois, dan tidak individualis sebagai dasar nilai-nilai yang berkembang dalam hubungan sosial. Bentuk nyata dalam ikatan solidaritas itu ditunjukkan melalui kegiatan gotong royong, sikap empati dan perilaku yang mau menolong orang lain dan bahu membahu dalam melakukan berbagai upaya untuk kepentingan bersama. Ikatan solidaritas itu akan menghasilkan energi atau kekuatan masyarakat untuk dapat diaktualisasikan dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Hanya saja potensi modal sosial warga desa tersebut belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah khususnya pemerintah desa untuk dapat didayagunakan secara maksimal dalam mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan. Hasil kajian Martin Baru, dkk (2017) bahwa belum adanya sinergitas antara potensi modal sosial warga desa

dengan potensi sumber daya aparatur desa, akibatnya belum terwujud kepercayaan warga desa terhadap pemerintahan desa. Tidak jauh berbeda dari hasil penelitian Kusumastuti, (2015), Pada pembangunan infrastruktur (air, listrik, dan jalan) masyarakat mengembangkan kepercayaan, interaksi yang kuat antar sesama anggota, norma/aturan yang menunjukkan tipe modal sosial *bonding*. Modal sosial yang terikat ini menghasilkan kapasitas adaptasi, antara lain berupa: kerja sama, partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalam anggota kelompok. Bentuk-bentuk kapasitas adaptasi yang dikembangkan adalah sebuah daya lenting dan fleksibilitas untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan infratsruktur perdesaan. Ahmadrswan Nasution (2016), hasil temuannya menunjukkan bahwa keberadaan modal sosial menjadi relevan dan penting dalam pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan di perdesaan Indonesia. Dengan demikian, pemerintah dan pihak terkait diharapkan membuat kebijakan yang memfasilitasi pengembangan modal sosial rumah tangga miskin melalui, (1) pelibatan tokoh masyarakat, (2) memperluas jejaring sosial, dan (3) meningkatkan frekuensi interaksi antar masyarakat.

Dari temuan penelitian diatas, bahwa warga desa memiliki potensi modal sosial yang sangat bermanfaat dalam mendukung program pembangunan desa. Apabila modal sosial dapat diberikan peluang untuk bersinergi dengan peran dan fungsi lembaga pemerintah desa dipastikan dapat menjadi kekuatan yang besar untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial. Potensi modal sosial menghasilkan bentuk kerjasama (*cooperation*) dan aksi bersama (*collective action*) antar warga desa yang dapat didayagunakan untuk menunjang



penyelenggaraan pembangunan desa. Francis Fukuyama dalam Hasbulah (2006), bahwa: “modal sosial adalah segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan didalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi. Tujuan bersama ini adalah merupakan suatu upaya untuk mencapai kemakmuran yang lebih besar, dan kemakmuran ini akan mudah dicapai oleh suatu masyarakat yang saling percaya atau memiliki kepercayaan yang kuat ketimbang masyarakat yang tingkat kepercayaannya rendah. Sehingga modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan modern atau dapat diartikan bahwa modal sosial merupakan syarat mutlak bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas demokrasi”

II. KAJIAN LITERATUR

Mobilitas pembangunan masyarakat sangat tergantung keberhasilannya dari kelompok masyarakat untuk membangun kerja sama, karena kerja sama itu akan menjadi sumber kekuatan apabila disinergikan dengan komitmen pemerintah untuk merumuskan langkah-langkah yang efektif dalam menumbuhkan kemauan masyarakat guna mengatasi hambatan-hambatan sosial. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan keterlibatan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses penentuan program pembangunan desa. Pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa harus diawali dengan keterlibatannya dalam penentuan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan melalui keterlibatan masyarakat dapat mensesuaikan antara program pembangunan desa dengan keinginan dari kelompok-kelompok masyarakat, dan sekaligus menumbuhkan

kepercayaan masyarakat terhadap visi, misi dan tujuan pembangunan desa.

Modal sosial sebagai sumber kekuatan dalam institusi sosial, karena akan terciptanya hubungan sosial yang harmonis antar anggota kelompoknya, dengan senantiasa menjaga norma-norma sosial yang melandasi perilaku dalam kelompok-kelompok masyarakat, dan bahkan modal sosial sebagai perekat untuk menjaga kebersamaan anggota kelompok secara bersama-sama. Modal sosial diyakini sebagai komponen dalam menggerakkan kebersamaan, melalui pengembangan sikap saling mempercayai dan saling menguntungkan. Sebagai kekuatan institusi sosial memiliki fungsi strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa, sebab tanpa dukungan dari institusi sosial maka pembangunan desa akan mengalami hambatan dalam mewujudkan tujuan yang hendak diwujudkan. Modal sosial dapat menjadi sumber daya masyarakat yang dapat diberdayakan dalam berbagai bidang kehidupan sosial. Modal sosial secara individu akan menghasilkan bentuk kerja sama dalam kelompok masyarakat, dan bahkan kerja sama kemasyarakatan yang lebih luas. Menurut Fukuyama (1995), modal sosial sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalannya kerjasama di antara mereka. Dalam kelompok kerja sama, hubungan dan interaksi sosial dilandasi oleh adanya nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam kelompok kerja sama itu. Bagi individu sebagai anggota kelompok berkewajiban untuk senantiasa mentaati dan memegang teguh nilai-nilai dan norma sosial itu dalam menjalankan kegiatannya, apabila terjadinya penyimpangan terhadap nilai-nilai dan norma sosial maka akan menurunkan kegiatan kerja sama itu. Menurut *Rosadi (2003)*, secara umum modal



sosial dapat dikaji melalui dua perspektif. *Pertama*, dari perspektif pelaku (*actor's perspective*) yang diformulasikan oleh Bourdieu, yang melihat modal sosial berisi sumber daya di mana pelaku individu dapat menggunakan karena kepemilikan terhadap jaringan secara eksklusif (*exclusive networks*). *Kedua*, dari perspektif masyarakat (*society's perspective*) yang melihat modal sosial sebagai barang publik yang diatur oleh organisasi dan jaringan horisontal yang eksis dalam masyarakat. Coleman melihat langsung dari dua sudut pandang tersebut, tetapi dengan cakupan yang lebih luas (*wider range*) mengenai bentuk-bentuk modal sosial, termasuk ekspektasi, norma, dan sanksi. *Dari pendapat diatas, maka modal sosial dapat dilihat dari aspek warga desa sebagai pelaku memiliki potensi yang dimungkinkan untuk berperan serta dalam kehidupan sosial, yang akan menghasilkan bentuk gotong royong, dan keswadayaan masyarakat. Sedangkan dari aspek masyarakat berkembang hubungan sosial dalam suatu kelompok-kelompok kemasyarakatan yang dinamis yang dilandasi oleh kepercayaan, nilai-nilai dan jaringan, dan sekaligus menjadi perekat dalam ikatan kehidupan sosial. Hubungan sosial akan terjalin dalam suasana kerja sama yang baik, sehingga dimungkinkan akan berlangsung interaksi sosial yang semakin tinggi antar warga untuk saling bertukar informasi serta berbagai nilai dan norma-norma sosial. Ditegaskan oleh Lesser (2000), modal sosial sangat penting bagi komunitas karena (1) memberikan kemudahan dalam mengakses informasi bagi anggota komunitas; (2) menjadi media pembagian kekuasaan dalam komunitas; (3) mengembangkan solidaritas; (4) memungkinkan mobilisasi sumber daya komunitas; (5) memungkinkan pencapaian bersama; dan (6) membentuk perilaku kebersamaan dan berorganisasi komunitas.*

Modal Sosial sebagai kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerjasama membangun suatu jaringan guna mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang timbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun diatas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan hubungan diatas prinsip-prinsip imbal balik, saling menguntungkan dan dibangun diatas kepercayaan. Menurut Robert Putnam dalam Lawang (2004), ada 3 aspek penting dalam modal sosial dilihat sebagai institusi sosial yang melibatkan kepercayaan/*Trust* (kejujuran, kewajaran, sikap egaliter, toleransi, dan kemurahan hati), jaringan Sosial/*Social Networks* (partisipasi, resiprositas, solidaritas, kerjasama), dan Norma (nilai-nilai bersama, norma dan sanksi, aturan-aturan). Jaringan sosial akan membentuk kerja sama baik secara individu maupun secara kelompok. Secara individu, dimana setiap individu memiliki jejaring sosial yang sangat bermanfaat untuk menjalin kerja sama antara individu, dan dimungkinkan dapat mengarah pada kegiatan yang saling menguntungkan. Sedangkan secara kelompok sosial, jejaring sosial dapat memperluas bidang tujuan yang ingin dicapainya, karena keberhasilan suatu institusi sosial sangat tergantung pada upaya memanfaatkan jejaring sosial itu guna memperluas usaha yang dicapainya. Kelangsungan suatu jejaring sosial itu sangat tergantung dari kepercayaan yang telah dibangun, karena kepercayaan akan menghasilkan keyakinan bersama untuk tetap berlangsungnya kegiatan kerja sama itu. Kepercayaan itu akan dihasilkan apabila masing-masing pihak selalu memegang nilai-nilai sebagai suatu batasan untuk bertindak dalam kegiatan kerja sama. Fukuyama (2002:24) mendefinisikan



kepercayaan yaitu norma-norma kooperatif seperti kejujuran dan kesediaan untuk menolong yang bisa dibagi-bagi antara kelompok-kelompok terbatas masyarakat dan bukan dengan yang lainnya dari masyarakat atau dengan lainnya dalam masyarakat yang sama. Jika para anggota kelompok itu mengharapkan bahwa anggota-anggotanya yang lain akan berperilaku jujur dan terpercaya, maka mereka akan saling mempercayai. Lebih lanjut Fukuyama (2002:72) menjelaskan bahwa: kepercayaan adalah efek samping yang sangat penting dari norma-norma sosial yang kooperatif yang memunculkan *social capital*. Jika masyarakat bisa di andalkan untuk tetap menjaga komitmen, norma-norma saling menolong yang terhormat, dan menghindari perilaku oportunistik, maka berbagai kelompok akan terbentuk secara lebih cepat, dan kelompok yang terbentuk itu akan mampu mencapai tujuan-tujuan bersama secara lebih efisien. Kepercayaan tumbuh karena akibat kebajikan sosial yang dilakukannya, sehingga orang lain menjadi yakin akan apa yang diniatkannya. Untuk itu, Cox (1995) mendefinisikan, modal sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma, dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisien dan efektifnya koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan dan kebajikan bersama. Lebih lanjut Cox menegaskan bahwa kekuatan kerja sama itu dibutuhkan adanya kepercayaan (*trust*), yaitu saling menjaga nilai-nilai dan norma sosial itu dalam menjalin hubungan sosialnya. Kepercayaan sebagai basis kekuatan kerja sama dalam suatu kelompok masyarakat, maka agar tetap terjaga kelangsungan kerja sama itu dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu anggota kelompok untuk selalu mentaati terhadap nilai-nilai yang telah digariskan dalam kelompok masyarakat. Kepercayaan menjadi dasar kekuatan kerja sama itu,

karena dilandasi oleh adanya saling pengertian dalam suatu ikatan kelompok bersama.

Dengan demikian modal sosial sebagai kekuatan institusional apabila terwujudnya kepercayaan antara warga masyarakat terhadap pemerintahan desa. Untuk itu, menjadi sangat berkepentingan bagi pemerintah desa untuk senantiasa menjalin hubungan yang baik antara warga masyarakat melalui institusi sosial yang ada. Karena dengan hubungan yang sinergitas akan mendorong tumbuhnya kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintahan desa. Demikian halnya dengan pemerintah desa harus senantiasa menghasilkan program pembangunan desa yang sungguh berorientasi pada kebutuhan warga desa, maka untuk mengurangi keraguan atau ketidakpercayaan perlu melibatkan warga masyarakat dalam proses penyusunan pembangunan desa tersebut

III. METODE PENELITIAN

Untuk memenuhi tujuan dari penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) kecamatan, Kabupaten Madiun dengan pertimbangan masing-masing kecamatan dipilih karena memiliki geografis, budaya, dan kondisi sosial-ekonomi berbeda, sehingga dapat dipastikan survey yang beragam dengan populasi tersebut dapat menghasilkan data yang bervariasi. Dari 3 (tiga) kecamatan, untuk masing-masing kecamatan diwakili 2 (dua) desa, yang dipilih berdasarkan tehnik "*Purposive Sampling*". Menurut Sugiyono (2002), "*purposive sampling* adalah tehnik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja". Disamping itu, penentuan sampel ditetapkan berdasarkan subyek yang berkompeten serta secara langsung mengetahui, memahami, dan sekaligus terlibat didalamnya. Subyek penelitian masing-masing desa ditetapkan 20 orang terdiri dari: 3 orang perangkat desa, 2 orang BPD (Badan Permusyawaratan Desa), 2



orang LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan 3 orang RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga).

Tehnik pengumpulan data, meliputi observasi, wawancara, daftar pertanyaan, dan dokumentasi. Sedangkan analisa data menggunakan metode *Statistik Deskriptif*, yaitu menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Untuk melakukan analisis data, yang datanya bersifat ordinal maka diperlukan skala pengukuran likert. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang berupa kata-kata antara lain: a) Sangat setuju dengan skor 5, b) Setuju dengan skor 4, c) Ragu-ragu dengan skor 3, d) Tidak setuju dengan skor 2, dan e) Sangat tidak setuju dengan skor 1.

Dengan mendasarkan pada skala pengukuran tersebut, maka dalam interpretasi terhadap data yang diperoleh dilakukan melalui perhitungan skala likert yaitu menilai suatu distribusi frekuensi dengan mengklasifikasikan kedalam 5 (lima) kategori nilai: Sangat baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Modal Sosial Warga Desa.

Dalam setiap individu memiliki potensi modal sosial, dan apabila terjadi sinergi dengan kepentingan umum akan menjadi kekuatan yang besar untuk mendukung berbagai program pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat desa selalu menjaga kelangsungan hubungan sosial, dan bahkan menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat, kekuatan hubungan sosial itu dapat menjadi sumber daya sosial yang bermanfaat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat desa. Keberlangsungan hubungan sosial itu,

dilandasi oleh adanya *trust* antar anggota warga desa. *Trust* akan melahirkan sikap kepedulian terhadap sesama warga, hal ini terindikasi dari sikap saling tolong menolong, saling membantu apabila warga desa mengalami musibah dan atau memiliki hajatan keluarga. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa warga desa masih selalu menjaga hubungan sosial melalui sikap tolong menolong, saling menghormati, dan selalu menjaga hubungan yang harmonis. Hal ini teridentifikasi dengan sikap membantu tanpa pamrih kepada tetangga yang memiliki hajatan kebahagiaan dan atau yang terkena musibah, baik dalam bentuk materi maupun non materi. Berkembangnya sikap saling tolong menolong sebagai perwujudan tanggung jawab setiap warga desa untuk selalu peduli terhadap kepentingan sosial. Keterlibatan warga desa itu, tidak hanya terbatas dalam kegiatan sesama tetangga saja melainkan juga dalam kegiatan-kegiatan sosial, seperti kegiatan gotong royong dalam memperbaiki selokan, jalan desa yang rusak, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: keterlibatan warga desa dalam kegiatan gotong royong juga dilakukan untuk tujuan-tujuan pembangunan sosial, bahkan gotong royong itu tidak hanya sebatas tenaga fisik saja melainkan sumbangan dalam bentuk materi. Bagi warga desa yang memiliki kelebihan materi memberikan dana untuk pembangunan sosial, dan bagi warga desa yang kurang mampu memberikan sumbangan tenaga. Kondisional ini sudah berlangsung semenjak dulu dan bahkan telah menjadi tradisi dalam kehidupan masyarakat desa.

Disamping itu, warga desa sangat kuat mempertahankan norma-norma sosial yang menjadi landasan perilaku kehidupan bermasyarakat, walaupun norma-norma sosial itu tidak tertulis akan tetapi warga desa tetap menjadi pijakan dalam berperilaku. Hasil penelitian menunjukkan, ketaatan



warga desa terhadap norma sosial sangat kuat dan bahkan terjadi pelanggaran akan mendapatkan sanksi sosial, seperti dikucilkan, atau diperbincangkan dalam hubungan sosial. Ketaatan norma-norma sosial inilah menjadikan kondisi lingkungan menjadi lebih kondusif, aman dan nyaman dalam menjalankan berbagai kegiatan-kegiatan. Berkembangnya nilai-nilai sosial yang positif, dapat menjadi dorongan warga

desa untuk tidak mudah menyerah dengan keadaan yang terjadi, sehingga memacu warga untuk berkembang dan maju. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa modal sosial warga desa sangat potensi untuk dapat didayagunakan berbagai kegiatan-kegiatan sosial, selengkapnya data penelitian dimaksud dapat diikuti tabel dibawah ini.

Tabel. 1
Potensi Modal Sosial Warga Desa

No.	Kategori/Interval Skor Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	8	6,67
2	Baik	30	25,00
3	Cukup baik	46	38,33
4	Tidak baik	31	25,83
5	Sangat tidak baik	5	4,17
JUMLAH		120	100

Sumber: Data primer diolah

Potensi modal sosial warga desa menunjukkan 26,67% memiliki kekuatan sangat baik, 25,00% dengan kekuatan baik, 38,33% dengan kekuatan cukup baik, 25,33% dengan kekuatan tidak baik, dan 4,17% dengan kekuatan sangat tidak baik. Dengan demikian potensi modal sosial kecenderungannya memiliki kekuatan cukup baik, ini menunjukkan sangat potensi untuk didayagunakan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian, potensi modal sosial perlu ditumbuhkan dan dikembangkan menjadi kekuatan sosial yang optimal dalam mempercepat kemajuan-kemajuan desa melalui upaya mendukung berbagai program pembangunan desa.

Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

Pembangunan desa dimaksudkan sebagai usaha untuk mempercepat proses kemajuan dan sekaligus sebagai stimulus bagi upaya pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di desa, seperti kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan lain sebagainya. Berbagai upaya pemerintah

telah dilakukan dengan berbagai program pembangunan, namun sampai saat ini belum terlihat secara nyata keberhasilan pembangunan itu. Salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah program pembangunan desa selama ini bukan cerminan kepentingan warga desa melainkan kepentingan sebagian kecil elit-elit desa. Keterlibatan warga desa dalam tahapan pembangunan hanya sebatas untuk memenuhi formalitas saja, sehingga menghilangkan essensi dari pelibatan warga desa. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelibatan warga desa selama ini hanya sebatas untuk mengadministrasikan masukan-masukan dari warga desa, dan hampir sebagian besar program pembangunan yang dihasilkan oleh pemerintah desa tidak sesuai, dan atau tidak ada kaitannya dengan pelibatan warga desa dalam forum pembangunan desa tersebut. Keterlibatan warga desa dalam pembangunan yang seringkali dilakukan pada tahapan pelaksanaan pembangunan saja, sehingga makna strategis keterlibatan



warga desa dalam pelaksanaan pembangunan bukan sebagai bentuk tanggungjawab sebagai warga desa melainkan sebatas sebagai pekerja yang diberikan imbalan upah saja. Kondisional diatas, menyebabkan warga desa menjadi

pasif dan masa bodoh terhadap program-program pembangunan dari pemerintah desa. Selengkapnya data penelitian dalam penyelenggaraan pembangunan desa dapat diikuti tabel berikut ini.

Tabel. 2
Pelaksanaan Pembangunan Desa

No.	Kategori/Interval Skor Nilai Variabel	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	Sangat baik	10	8,33
2	Baik	29	24,17
3	Cukup baik	56	46,67
4	Tidak baik	21	17,50
5	Sangat tidak baik	4	3,33
JUMLAH		120	100

Sumber: Data primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan desa menunjukkan 8,33% memiliki nilai sangat baik, 24,17 % dengan nilai baik, 46,67% dengan nilai cukup baik, 17,50% dengan nilai tidak baik, dan 3,33% dengan nilai sangat tidak baik. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan desa berjalan cukup baik, namun demikian perlu lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan pembangunan desa mendapatkan dukungan atau legitimasi dari warga desa.

Sinergitas Potensi Modal Sosial dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

Modal sosial sebagai sumber daya sosial warga desa yang dapat didayagunakan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Modal sosial dibangun atas dasar peran serta masyarakat dalam hubungan sosial, keterlibatan masyarakat akan mendorong terjadinya sinergitas kepentingan bersama dalam upaya menyatukan suatu tindakan bersama untuk mewujudkannya. Dengan sinergitas tersebut akan menebarkan nilai-nilai positif yang senantiasa mengutamakan kepentingan bersama. Kerjasama yang terikat dalam potensi modal sosial tersebut telah tumbuh dan berkembang menjadi

kekuatan sosial yang mengikat dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai kerja sama itu dikenal dengan konsep gotong royong, yaitu sebagai bentuk kesadaran bahwa setiap individu memiliki kelemahan dan kelebihan, maka masing-masing individu saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kusnaedi (2006), mengemukakan bahwa: gotong royong merupakan sikap positive yang mendukung dalam perkembangan desa dan juga perlu dipertahankan sebagai suatu perwujudan kebiasaan melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Lebih lanjut Widjaja (2004), gotong royong sebagai suatu ciri khas masyarakat pedesaan tidak terlepas dari eksistensi masyarakatnya sebagai individu maupun sebagai makhluk social. Sebab manusia sesuai dengan kualitasnya mampu membangun dirinya yaitu manusia yang mengetahui serta sadar dan memiliki kesadaran akan kebutuhannya. Gotong royong yang berkembang dalam masyarakat desa mampu menghasilkan keswadayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat. Keswadayaan masyarakat dapat berupa semangat warga desa untuk mengatasi segala masalah-masalah yang dihadapi oleh lingkungan desa. Keberhasilan pembangunan desa selama ini tidak dapat



dilepaskan dari keswadayaan warga desa, karena adanya keterbatasan anggaran pembangunan desa. Dengan adanya keswadayaan warga desa mampu menghasilkan potensi sumber daya material dan atau sumber daya fisik berupa tenaga untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Kuatnya keswadayaan warga desa karena dilandasi oleh adanya perasaan persaudaraan dan senasib sepenanggungan dapat mendorong lebih banyak warga desa ikut serta dalam proses pembangunan yang partisipatif.

Salah satu faktor utama untuk menumbuhkan potensi modal sosial adalah *trust* yang harus dapat dibangun oleh pemerintah desa, sehingga memberikan keyakinan kepada warga desa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui program-program kerjanya benar-benar difokuskan untuk kepentingan warga desa dan kemajuan desa. Maka dari itu, komitmen, integritas, transparansi, akuntabilitas perlu menjadi prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Komitmen menunjukkan kuatnya keinginan pemerintah desa dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan pemerintah desa. Melalui program kerja secara nyata yang diarahkan untuk

kepentingan warga desa maka dapat menumbuhkan kepercayaan untuk ikut serta dalam proses pembangunan desa tersebut. Oleh karena itu, kejujuran (integritas) dari penyelenggara pemerintah desa dapat memotivasi warga desa untuk bersama-sama mensukseskan program pembangunan desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi penting bagi setiap tahapan pelaksanaan pembangunan desa, agar warga desa dapat mengetahui dan sekaligus melakukan kontrol sosial dalam penyelenggaraan pembangunan desa.

Namun dari temuan penelitian, menunjukkan bahwa pemerintah desa belum memberikan perhatian terhadap potensi modal sosial warga desa, bahkan pemerintah desa hanya memandang sebelah mata makna strategis dari potensi modal sosial tersebut. Orientasi pembangunan desa yang dihasilkan pemerintah belum terjadi sinkronisasi dengan aspirasi dan kebutuhan warga desa. Pelibatan warga desa dalam tahapan pembangunan desa hanya sekedar memenuhi ketentuan formalitas saja, karena program pembangunan desa sudah direncanakan oleh sebagian kecil elit-elit desa, selengkapnya hasil analisis dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel. 3

Sinergitas Potensi Modal Sosial dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa

No.	Kategori Nilai Variabel	Variabel-Variabel Penelitian	
		Modal Sosial (%)	Pelaksanaan Pembangunan Desa (%)
1	Sangat Baik	6,67	8,33
2	Baik	25,00	24,17
3	Cukup Baik	38,33	46,67
4	Kurang Baik	25,83	17,50
5	Tidak Baik	4,17	3,33
JUMLAH		100	100

Sumber: Data Primer diolah

Dari tabel diatas, menunjukkan potensi modal sosial warga desa cenderung berkembang cukup baik sebesar 38,33%, demikian pula penyelenggaraan pembangunan desa cenderung berjalan

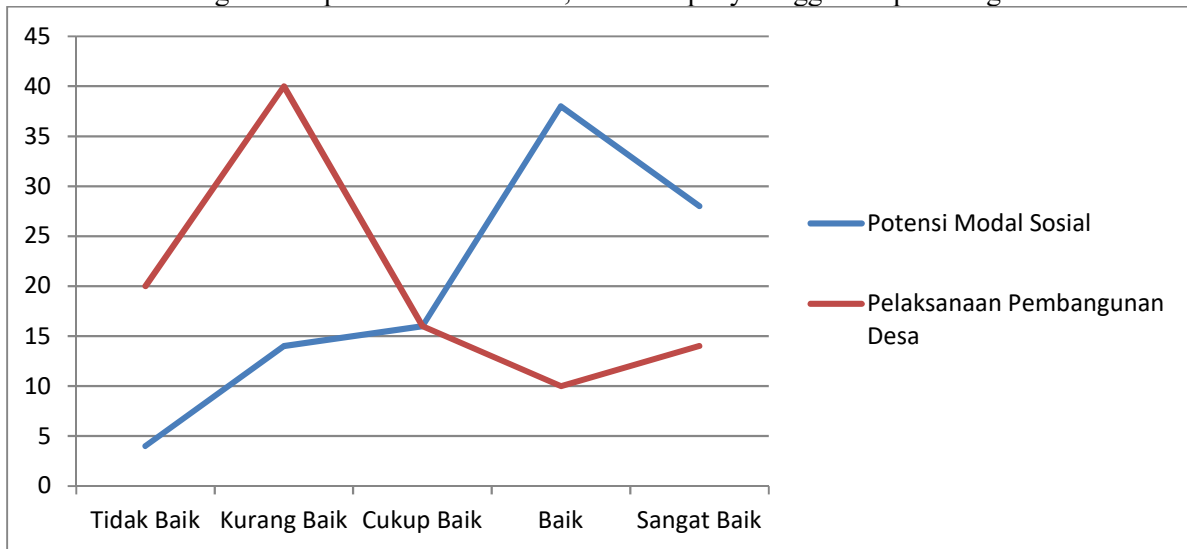
cukup baik sebesar 46,67%. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan nilai potensi modal sosial diikuti dengan baiknya penyelenggaraan pembangunan desa, atau dengan kata lain semakin baik potensi modal



sosial warga desa maka semakin baik pula penyelenggaraan pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya dapat diikuti grafik berikut ini.

Grafik 1

Perbandingan nilai potensi modal sosial, dan nilai penyelenggaraan pembangunan desa



Dari grafik diatas, menunjukkan modal sosial kecenderungan prosentase terbesar pada nilai cukup baik sebesar 38,33%, ini berarti modal sosial sangat potensial sebagai sumber daya sosial yang dapat diberdayakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini terindikasi dari hasil nilai penyelenggaraan pembangunan desa cukup sebesar 46,67%. Hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah potensi modal sosial dalam lingkungan warga desa, karena nilai potensi modal sosial masih relatif rendah, serta masih sangat terbuka untuk mendorong dan menumbuhkan potensi modal sosial apabila semakin meningkat trust/kepercayaan warga desa terhadap pemerintah desa. Program pembangunan desa yang dihasilkan pemerintah desa harus mampu meyakinkan kepada warga desa bahwa tujuan program pembangunan desa diorientasikan untuk kepentingan warga desa.

didapat persentase 91,6% berdasarkan kriteria kelayakan, media pembelajaran AVOD ini termasuk kualifikasi valid/layak digunakan pada kegiatan pembelajaran. Data pada uji tingkat keberhasilan belajar dengan rata-rata 90% dalam total populasi tuntas belajar.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Modal sosial warga desa sangat potensial untuk didayagunakan dalam mendukung berbagai permasalahan sosial yang berkembang di pedesaan, dan bahkan dapat menjadi kekuatan yang besar untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian, pemerintah desa belum memanfaatkan potensi modal sosial secara optimal dalam mendukung program pembangunan desa, pelibatan warga desa dalam tahapan pembangunan desa hanya sebatas memenuhi ketentuan formalitas saja. Akibatnya program pembangunan desa tidak sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan warga desa.

Menyikapi kondisi diatas, maka perlu diwujudkan kepercayaan warga desa terhadap lembaga pemerintah desa melalui regulasi kebijakan pembangunan desa yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga desa. Pelibatan warga desa dalam tahapan pembangunan seharusnya dimulai pada tahap identifikasi masalah dan penyusunan program pembangunan desa, sampai pada tahap pelaksanaan dan pemanfaatan hasil pembangunan desa.

Temuan penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam bidang pendidikan yaitu mengembangkan media pembelajaran AVOD ini dapat



digunakan untuk memudahkan dan memaksimalkan hasil belajar mahasiswa.

- 1) Untuk melaksanakan penelitian pengembangan lebih lanjut yang lebih akurat, disarankan untuk pengembang membandingkan beberapa media yang selama ini telah dikembangkan sehingga pengguna dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.

REFERENSI

- Ahmadrswan Nasution, dkk, 2016, Dampak Modal Sosial terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Pedesaan di Indonesia, *jurnal.dpr.go.id/index.php/ekp/article/view/672*, diakses tanggal 21 Januari 2019
- Coleman. J. 1999, *Social Capital in The Creation of Human Capital*, Cambridge Mass:Harward University Press.
- Cox, Eva, 1995, *A Trully Civill Society*. Sydney: ABC Book
- Fukuyama, Francis, 1995, *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Penerbit Qolam, Yogyakarta.
-, 2002, *Social Capital Civil Society and Development*, Third Word Quarterly, 22(1):7-200.
- Hasbullah, J., 2006. *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press
- Kusumastuti, Anis, 2015, Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur, <https://wongdesmiwati.wordpress.com/.../modal-sosial-petani-pengg...>, diakses tanggal 21 Januari 2019
- Lawang. Robert. Mz, 2004, *Kapital Sosial dalam perspektif Sosiologik*, Fisip UI Press:Depok-Jakarta.
- Lesser. F. 2000, *Knowledge and Social Capital: Foundation and Aplication*, Boston-Boutterwhorth-Heinneman.
- Martin Baru, dkk, 2017, *Utilization of Social Capital in Strengthening Village*

Government Institutions, Jurnal Research Humanities and Social Study IISTE, India, Vol. 7, No.16.

- Rosadi. S, 2003, *Community-Based Forest Management in Java, Indonesia: The Issues of Poverty Alleviation, Deforestation and Devolution. Socioeconomics Studies on Rural Development. Vol. 135* Wissenschaftsverlag Vauk Kiel KG. Germany.
- Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Albert